



## Implementasi Program Kampung KB Berkelanjutan dan Berkembang

Lisa Dwi Fitriani<sup>1</sup>; Irvan Nur Ridho<sup>2</sup>; Yusuf Adam Hilman<sup>3\*</sup>; Bambang Triono<sup>4</sup>

<sup>123</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia

\*) Penulis Korespondensi : 545471adamongis@gmail.com

**Abstract.** *The purpose of this study is to provide an overview of how the implementation of the sustainable family planning village programme in Nongkodono Village and the developing family planning village in Karanglo Kidul Village, Ponorogo Regency. This research is descriptive qualitative research, with data collection techniques including: observation, interviews, and documentation, using a data analysis model with the following sequence: data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The implementation of Sustainable KB Village shows how the programme focuses on preserving and developing existing initiatives by involving all elements of the community and ensuring the continued involvement of various parties. The implications for residents include improved welfare through economic empowerment programmes, better access to health care, and a deeper understanding of reproductive health and family planning, all of which contribute to an improved quality of life. Meanwhile, Kampung KB Berkembang is in the development phase and focuses on increasing community participation and strengthening infrastructure and services that support family health and welfare. The implications for residents include improved access to health services and education, as well as increased social participation leading to a more cohesive and supportive community. The two programmes have similarities in terms of best practices in the implementation of this programme including active community participation, collaboration with various stakeholders, and continuous education. Constraints to the programme include low initial participation, limited resources, and challenges in socialisation effectiveness. The benefits of the programme are good, including improved quality of life, population growth control, and more equitable welfare for village communities, which ultimately creates a long-term sustainable positive impact.*

**Keywords:** Implementation, Quality Family Village (KB), DPPKB, PLKB, Working Group

**Abstraksi.** *Tujuan kajian ini memberikan gambaran terkait bagaimana implementasi program kampung KB berkelanjutan di Desa Nongkodono dan kampung KB berkembang di Desa Karanglo Kidul Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data meliputi: observasi, wawancara, dan dokumentasi, menggunakan model analisis data dengan urutan sebagai berikut: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Implementasi Kampung KB Berkelanjutan menunjukkan bagaimana program ini fokus pada pelestarian dan pengembangan inisiatif yang sudah ada dengan cara melibatkan seluruh elemen masyarakat dan memastikan keterlibatan berkelanjutan dari berbagai pihak. Implikasinya bagi warga adalah dapat*

meningkatkan kesejahteraan dengan program pemberdayaan ekonomi, serta terbuka akses kesehatan yang lebih baik, serta pemahaman yang lebih mendalam tentang kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup. sementara itu Kampung KB Berkembang berada dalam fase pengembangan dan terfokus pada peningkatan partisipasi warga serta penguatan infrastruktur serta layanan yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Implikasinya bagi warga mencakup peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan edukasi, serta peningkatan partisipasi sosial yang mengarah pada komunitas yang lebih solid dan saling mendukung. berangkat dari kedua program, memiliki kesamaan dalam hal Best practice dalam pelaksanaan program ini termasuk partisipasi aktif masyarakat, kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, serta edukasi yang berkesinambungan. Kendala program ini seperti partisipasi awal yang rendah, keterbatasan sumber daya, dan tantangan dalam efektivitas sosialisasi. Manfaat dari program ini baik, termasuk peningkatan kualitas hidup, pengendalian pertumbuhan penduduk, dan kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat desa, yang pada akhirnya menciptakan dampak positif jangka panjang yang berkelanjutan.

**Kata kunci:** Implementasi, Kampung KB, DPPKB, PLKB, Kelompok Kerja

---

diunggah: Agustus 2024; direvisi: Januari 2025; disetujui: Maret 2025

*This is an open access article under the CC-BY licence*



© the Author(s). 2025

Cara Sitasi: Fitriani Lisa Dwi et all (2025). Implementasi Program Kampung KB Berkelanjutan dan Berkembang. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian dan Pengembangan*,9(1), 353-367.

<https://doi.org/10.32630/sukowati.v9i1.516>

## PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat disebuah wilayah akan terus tumbuh dengan segala bentuk potensi dan juga segala macam persoalannya, ada beberapa persoalan-yang sering muncul seiring dengan perkembangan masyarakat, seperti: kebodohan, kemiskinan, kriminalitas, pengangguran, *stunting*, dan beberapa problem sosial lainnya.

Melihat kondisi tersebut maka perlu upaya dalam peningkatan kualitas SDM, Kapasitas komunitas, serta peran keluarga yang menjadi pusat kegiatan serta aktifitas keseharian dari kegiatan manusia, sehingga perlu diupayakan kegiatan yang terukur dan berkelanjutan, dalam bentuk program pembangunan serta pemberdayaan seperti petunjuk presiden melalui (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3, 2022). Maka perlu dibentuk kampung KB guna mengoptimalkan kualitas keluarga dan mengoptimalkan pelaksanaan program tersebut.

Sejarah terbentuknya Kampung KB berawal dari diterbitkannya surat dari kepala BKKBN dengan nomor 1258/AK.001/61/2015 tanggal 22 Oktober 2015 menandai dimulainya pembentukan Kampung KB. Pada 14 Januari 2016, Presiden Joko Widodo secara resmi Kampung KB dideklarasikan. Gagasan Kampung KB merupakan bentuk minimal untuk melaksanakan program KB yang komprehensif dan sistematis dan di tingkat desa, kelurahan, kecamatan. Kampung KB merupakan gambaran bagaimana seharusnya sikap warga ketika program KB diberlakukan. Inisiatif diputuskan, dibuat untuk, dan didukung oleh publik yang lebih luas. Tujuan utama saat ini adalah pengembangan masyarakat. Komunitas bertanggung jawab atas segala hal lainnya, pemerintah hanya bertindak mendorong dan memberikan bantuan (Angisna, 2018).

Kampung Keluarga Berencana (KB) adalah wilayah setingkat RW, dusun, atau desa yang memenuhi kriteria tertentu, dengan adanya integrasi program Bangga Kencana dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistem terstruktur (Widya Saputra *et al.*, 2019), namun pada tahun 2020 slogan Kampung Keluarga Berencana Mengalami perubahan. Kampung Keluarga Berencana menjadi Kampung Keluarga Berkualitas. Kampung Keluarga Berkualitas adalah program yang bukan hanya kegiatan berencana saja tapi lintas sektoral. Lintas sektoral itu semakin banyak sumber daya yang ikut berperan seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, TNI, POLRI, dan bidan desa (Nanggung *et al.*, 2023). Pokok tujuan dari pelaksanaan program ini yaitu: keluarga, yang mencakup keluarga dengan anggota yang terdiri dari anak-anak, remaja, dan lansia (Maleke *et al.*, 2022).

Pendirian Kampung KB dipilih berada di daerah pinggiran dengan angka kelahiran tinggi dan ekonomi lemah, sehingga lonjakan pertumbuhan penduduk semakin meningkat, dapat dipadamkan untuk mengurangi beban pembangunan. Motivasi pemerintah membuat program Kampung KB tentunya ada beberapa alasan mengapa hal ini di buat, antara lain untuk meningkatkan kebahagiaan pribadi daerah setempat pada level kota atau sederajat dengan program daerah terkait dan pembenahan, sepenuhnya bertujuan untuk menumbuhkan keluarga berkualitas dan memotivasi serta merevitalisasikan inisiatif Keluarga Berkualitas (KB) tujuan segmen penghargaan, bertujuan untuk meningkatkan kekuatan, status, dan ketentraman melalui berbagai program seperti Bina Keluarga Balita (BKB) adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam merawat dan mendidik anak balita, Bina Keluarga Remaja (BKR) adalah program yang fokus pada pembinaan keluarga dalam

mendampingi remaja agar tumbuh sehat dan berkarakter, sementara Bina Keluarga Lansia (BKL) adalah program yang mendukung keluarga dalam merawat dan meningkatkan kualitas hidup para lanjut usia (lansia) di lingkungan mereka. Ketiga program ini bertujuan untuk memperkuat peran keluarga dalam berbagai tahap kehidupan, mulai dari masa balita hingga lanjut usia, guna menciptakan keluarga yang sehat dan sejahtera.

Melihat realisasi program KB di kawasan pedesaan maka kita harus berkaca pada beberapa indikator penilaian, diantaranya: 1). Status IDM, 2). Jumlah Keluarga Miskin, 3). Angka Stunting 4). Ibangga. Hal ini penting untuk mengukur sejauhmana program tersebut berhasil.

Kami mencoba mengulik lebih dalam dan mengeksplere 2 (dua) desa di kabupaten Ponorogo yang menarik untuk di kaji dan di teliti secara mendalam, yaitu desa nongkodono dan desa karanglo kidul.

Tabel 1 perbandingan Indeks Desa Membangun (IDM)

<b>Nongkodono</b>	<b>Karanglo kidul</b>
Indek ketahanan sosial di desa, mencerminkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.	IKS Desa Karanglo Kidul meliputi kesehatan, pendidikan, modal sosial, dan permukiman normal
Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) Desa Nongkodono menunjukkan bahwa desa ini memiliki keragaman produksi yang cukup baik dengan adanya berbagai jenis usaha, meskipun mayoritas penduduknya bergantung pada sektor pertanian.	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) Desa Karanglo Kidul menunjukkan bahwa dalam dimensi Ketahanan Ekonomi, keragaman produksi di desa ini, yang berarti mayoritas mata pencaharian penduduk terkonsentrasi pada sektor tertentu, yakni pertanian
Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) Desa Nongkodono menunjukkan bahwa kualitas lingkungan, potensi, dan tanggap bencana berada pada tingkat normal.	IKL Desa Karanglo Kidul kualitas lingkungan potensi dan tanggap bencana normal.

Sumber: data hasil penelitian

Tabel 2 jumlah keluarga miskin

<b>Nongkodono</b>	<b>Karanglo kidul</b>
-------------------	-----------------------

ada 20 keluarga miskin yaitu 3 keluarga miskin, 6 miskin lansia tunggal, 3 keluarga miskin ekstrim, 3 miskin lansia, 5 miskin sakit menahun/ kronis	ada 20 keluarga miskin yaitu 3 keluarga miskin, 6 miskin lansia tunggal, 3 keluarga miskin ekstrim, 3 miskin lansia, 5 miskin sakit menahun/ kronis
---	---

Sumber: data hasil penelitian

Fakta kemiskinan di desa nongkodono memperlihatkan bahwa setiap kepala keluarga (KK) hanya memiliki satu orang anggota keluarga. Keadaan ini mencerminkan pola kehidupan keluarga miskin di Desa Nongkodono, yang dapat diukur dari aspek kebersamaan yang minim dalam satu rumah tangga, Upaya Desa Nongkodono dalam menurunkan angka kemiskinan melalui integrasi program peningkatan kesejahteraan dengan melibatkan masyarakat dan di dukung beberapa kegiatan di antaranya lewat program UPPKA dalam pembuatan keripik dan kue kering Hal ini untuk memandirikan masyarakat desa dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan ekonomi masyarakat.

Kondisi kemiskinan di karanglo memperlihatkan bahwa keluarga miskin yang hidup sendiri, sering sakit, dan tinggal di rumah dengan kondisi fisik yang kurang memadai, seperti lantai tanah yang belum dipasang keramik. Situasi ini menunjukkan kurangnya akses ke layanan kesehatan dan fasilitas perumahan yang layak, serta keterbatasan dalam kebersamaan sosial di dalam rumah tangga. Aspek kebersamaan yang minim dalam rumah tangga ini mencerminkan isolasi sosial dan kurangnya dukungan komunitas, yang semakin memperburuk kondisi ekonomi dan sosial keluarga miskin.

Tabel 3 angka stunting

<b>Nongkodono</b>	<b>Karanglo kidul</b>
9 kasus	50 kasus

Sumber: data hasil penelitian

Desa Nongkodono lebih unggul dalam program BKB dan keaktifan masyarakat yang mengikuti BKB di dalam posyandu di Desa Nongkodono, dan mengerti tambahan gizi khusus untuk anak-anak yang mengalami stunting. Upaya Desa Nongkodono untuk menurunkan angka stunting melalui kegiatan di Kampung KB, terutama Bina Keluarga Balita (BKB) dan menyelenggarakan DAHSAT (Dapur Sehat Atasi Stunting), penyuluhan dengan pengawalan tim kader KB, mulai dari pengawalan calon pengantin, waktu hamil, sampai sudah anak sudah lahir tetap ada pemantauan dari tim kader KB. Desa juga memberikan tambahan makanan

sehat dan bergizi untuk ibu hamil dan anak yang stunting. Upaya ini merupakan tanggung jawab pemerintah desa dalam menyediakan edukasi, pengawalan, dan aspek gizi, untuk penurunan stunting dan meningkatkan kesehatan masyarakat Desa Nongkodono.

Data ini umumnya tersedia dalam laporan survei kesehatan desa atau statistik kesehatan yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah yang mengelola program kesehatan dan gizi. Sebenarnya aktif dalam posyandu, program BKB sudah memberikan sosialisasi penyuluhan tentang stunting sudah akan tetapi kesadarannya kurang sehingga menyebabkan angka stunting tinggi. Peran aktif bidan desa dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang stunting, pentingnya gizi seimbang dan pola makan yang seimbang, dengan melakukan pemantauan pertumbuhan anak stunting. Upaya pencegahan stunting di Desa Karanglo Kidul dilakukan melalui DAHSAT (Dapur Sehat Atasi Stunting), pendampingan, pengawalan, dan dukungan nutrisi bagi ibu hamil serta balita. Pendampingan mencakup sosialisasi kepada masyarakat bertujuan untuk optimalisasi penurunan angka stunting. Desa juga memberikan makanan tambahan sehat dan bergizi khususnya untuk ibu hamil dan anak stunting. Pemerintah desa berperan pengawalan, memberikan edukasi dan memberikan tambahan gizi masyarakat untuk mengurangi angka stunting.

Tabel 4 angka iBingganya

<b>Nongkodono</b>	<b>Karanglo kidul</b>
75%	70%

Sumber: data hasil penelitian

Desa Nongkodono dalam aspek ketentraman Desa Nongkodono berhasil memberikan kartu jaminan sehat kepada penduduknya. Upaya ini memastikan setiap warga dapat mengakses layanan kesehatan di Poskendes (pos kesehatan desa) Nongkodono secara gratis bagi yang memiliki kartu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Sedangkan Desa Karanglo Kidul Dalam aspek ketentraman Desa Karanglo Kidul kartu jaminan Kesehatan belum merata. Upaya lain memastikan setiap warga bisa mengakses layanan kesehatan di poskendes (pos kesehatan desa) Karanglo Kidul secara gratis bila yang mempunyai kartu BPJS.

Melihat kondisi kedua desa tersebut, kita memiliki gambaran terkait bagaimana implementasi dari program KB yang sudah dijalankan, sehingga nampak keberhasilan maupun kegagalan program tersebut. berangkat dari kondisi itu, maka kami hendak melakukan kajian secara mendalam, oleh sebab itu kami

melakukan identifikasi dari beberapa riset terdahulu, apakah sudah ada kajian serupa, atau memiliki perbedaan.

Penelitian pertama, Tiara Angisna (2018) dalam penelitiannya yang berjudul "Evaluasi Efektivitas Pelatihan Kampung KB di Perwakilan BKKBN Provinsin Jawa Timur" membahas mengenai akibat dari kurangnya kesadaran awal beberapa peserta tentang Desa KB, terjadi peningkatan yang tidak proporsional dalam pengetahuan mereka tentang materi pelatihan, yang menyebabkan kinerja prates peserta di bawah standar. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang materi pelatihan yang ditawarkan di Kampung KB adalah tujuan yang diberikan. Secara keseluruhan, hasil belajar peserta pelatihan meningkat.

Penelitian **kedua**, menurut Hani Putri Azhari (2019) dalam penelitiannya yang berjudul "Strategi Komunikasi BKKBN Provinsi Sumantera Utara dalam mensosialkan program pembentukan kampung KB" membahas mengenai Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara menggunakan strategi komunikasi untuk sosialisasi program KB, yang melibatkan langkah-langkah seperti menetapkan tujuan, mengidentifikasi pesan, memfokuskan komunikasi, dan mengukur dampaknya. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah kendala. Dari segi internal, terlihat keterbatasan PAD, jumlah SDM yang terbatas, kurangnya kerjasama lintas sektor, serta kurangnya pembangunan sarana dan prasarana yang optimal karena absennya bantuan anggaran. Dengan pemahaman atas tantangan ini, diharapkan solusi yang lebih efektif dapat ditemukan untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi program kampung KB di Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian ketiga Rohayati *et al.*, (2021) Dalam penelitiannya yang berjudul "Pelaksanaan Program Kampung KB di Kelurahan Nyapah Kecamatan Walantaka Kota Serang," dijelaskan bahwa pelaksanaan Program Kampung KB di Kelurahan Nyapah belum mencapai tingkat optimal akibat berbagai hambatan. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan finansial, rendahnya keterlibatan masyarakat pada saat pelatihan ketahanan keluarga, serta kurangnya minat, terutama dari PUS, untuk bergabung sebagai peserta KB. Upaya perbaikan dilakukan melalui evaluasi program, peninjauan ulang terhadap kesiapan sumber daya serta koordinasi dengan teratur secara vertikal maupun horizontal.

Penelitian keempat, Febrian (2022) dalam penelitiannya bertajuk "Implementasi Program Kampung KB Dalam Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk Di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur,"

pelaksanaan Program Kampung KB dapat dikatakan berhasil dalam memperlambat laju pertumbuhan penduduk, terlihat dari komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi. Beberapa aspek sepenuhnya belum maksimal, seperti staf dan akomodasi dalam sumber daya. Penelitian ini menghadapi kendala seperti penyesuaian kegiatan yang terbatas, kurang komunitas di dalam Kampung KB.

Penelitian dahulu digunakan sebagai upaya para peneliti dalam mencari perbandingan dan sebagai sumber inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Kebaruan penelitian ini dengan penelitian dahulu ialah mengenai penelitian yang melibatkan dua kampung KB berkelanjutan Desa Nongkodono dan Kampung KB berkembang Desa Karanglo Kidul. Selain dua kampung KB tersebut, pada penelitian ini tentang implementasi kampung keluarga berkualitas (KB) berkelanjutan Desa Nongkodono dan kampung keluarga berkualitas (KB) berkembang Desa Karanglo Kidul. Hasil dari program kampung keluarga berkualitas (KB) ada 4 indikator berkelanjutan Desa Nongkodono dan kampung keluarga berkualitas (KB) berkembang Desa Karanglo Kidul alasan inilah yang kemudian membuat saya tertarik untuk mengetahui bagaimana implementasi program kampung KB.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan jenis studi kasus, mengambil kasus di desa Nongkodono dan Desa Karanglo Kabupaten Ponorogo. Kajian ini berusaha mengumpulkan data serta melakukan analisis dalam bentuk deskriptif, menggunakan: transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, dan rekaman video. Dari analisis tersebut, kesimpulan yang diambil berupa pemahaman umum yang abstrak mengenai realitas yang diteliti (Maemanah, 2017). Dalam praktiknya penelitian ini menempatkan peneliti pada posisi yang penting, sehingga perlu pemahaman yang mendalam dan menyeluruh, supaya dapat melakukan analisis secara jelas (Syahril, 2016).

Subjek penelitian ini adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo. Teknik yang digunakan untuk menentukan informan dalam penelitian ini adalah teknik purposif. Teknik ini dipilih sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, informan yang dipilih, adalah:

1. Kepala bidang pengendalian penduduk penyuluhan dan penggerakkan Kabupaten Ponorogo ibu Dra. Budi Lestari Mukti MM.
2. Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLBK) Kecamatan Jambon dan (PLKB) Kecamatan Kauman bapak Drs. Mulyoto dan ibu Ir. Titik Budhiyarti.

3. Kepala Desa Nongkodono Kecamatan Kauman bapak Jemadi, S.Sos sebagai ketua pokja kampung KB Desa Nongkodono.
4. Kepala Desa Karanglo Kidul Kecamatan Jambon ibu Islami, S.H sebagai ketua pokja Kampung KB Desa Karanglo Kidul.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang digunakan antara lain:

- 1). Wawancara merupakan metode dalam rangka pengumpulan informasi, melalui pertanyaan-pertanyaan yang diambil secara langsung atau (Soripada, 2021). Proses tata muka dna tanya jawab bertujuan untuk mendapatkan informasi yang terkait guna mendukung penelitian yang di lakukan di Desa Nongkodono Kecamatan Kauman dan Desa Karanglo Kidul Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Peneliti menggunakan wawancara dengan model semi terstruktur yang memungkinkan interviewer bisa mengeksplorasi hal-hal baru yang muncul selama wawancara (Apriliani *et al.*, 2021).
- 2). Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data, dengan cara mencatat atau merekam data dari arsip atau melalui informasi yang berkaitan dengan data penelitian, fungsi dapat digunakan untuk melengkapi informasi dasar yang diperoleh dari observasi dan wawancara (Arischa, 2020).

Di dalam penelitian ini ada tiga jalur analisis data kualitatif, yakni kondensasi data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman & Saldana, 2014) Adapaun tahapan-tahapan dalam proses analisis data yaitu: Kondensasi merupakan proses pengumpulan data dengan teknik wawancara, observasi, dan juga dokumentasi yang dilakukan langsung terhadap kampung KB berkelanjutan Desa Nongkodono dan kampung KB berkembang Desa Karanglo Kidul, selain mengambil data dari pemerintahan, penelitian ini juga akan mencari data dari masyarakat yang tergabung dalam kampung KB.

Penyajian data disajikan agar bisa membantu atau memudahkan penulis sehingga bisa memahami permasalahan yang ada sehingga bisa melanjutkan ketahap selanjutnya. Data yang disajikan berupa deskripsi, bagan, grafik dan lainnya. Setelah mengumpulkan data tentang bagaimana implementasi program kampung keluarga berkualitas (KB) berkelanjutan di Desa Nongkodono dan kampung keluarga berkualitas (KB) berkembang di Desa Karanglo Kidul Kabupaten Ponorogo maka langkah selanjutnya adalah menyusun hasil wawancara, observasi dan juga dokumentasi yang kemudian dibahas secara rinci.

Langkah terakhir setelah kondensasi data dan juga data-data disajikan dan dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Setelah data disajikan dengan bahasa yang lebih ringkas, padat dan mudah difahami Setelah mencari data mengenai bagaimana implementasi program kampung keluarga

berkualitas (KB) berkelanjutan di Desa Nongkodono dan kampung keluarga berkualitas (KB) berkembang di Desa Karanglo Kidul Kabupaten Ponorogo maka kesimpulan dipaparkan mengenai tentang implementasi program kampung keluarga berkualitas (KB) berkelanjutan di Desa Nongkodono dan kampung keluarga berkualitas (KB) berkembang di Desa Karanglo Kidul Kabupaten Ponorogo.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Komunikasi

Komunikasi memainkan peran yang sangat penting dan dilakukan dalam upaya meningkatkan pelaksanaan program Kampung KB. Di tingkat desa, koordinasi dilakukan melalui pertemuan kelompok kerja (pokja) yang difasilitasi untuk memastikan bahwa semua anggota dapat berkoordinasi dengan baik dan mengimplementasikan program sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pertemuan ini berfungsi untuk membahas kemajuan, mengatasi masalah, dan mengarahkan pelaksanaan program secara langsung di lapangan. Di tingkat kabupaten, pembinaan dilakukan oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang mengundang ketua pokja dari berbagai desa untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan di tingkat kabupaten. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas pokja dan memastikan konsistensi dalam pelaksanaan program di seluruh wilayah. Selain itu, komunikasi juga melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah desa, pokja, tim pendamping keluarga, tim kesehatan, posyandu untuk balita, BKL untuk lansia, serta tokoh masyarakat. Semua pihak ini harus aktif terlibat dalam kegiatan program Kampung KB untuk mencapai keberhasilan yang optimal.

Komunikasi yang efektif dilakukan baik secara online maupun offline, dengan pemanfaatan seperti aplikasi WhatsApp oleh kader-kader Kampung KB untuk mempermudah pertukaran informasi dan koordinasi. Koordinasi yang baik antar berbagai pihak menciptakan sinergi yang efektif dalam menjalankan program, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan rencana dan mampu mencapai target yang ditetapkan. Komunikasi yang efisien memungkinkan penyesuaian dan respons cepat terhadap kebutuhan serta tantangan di lapangan, sehingga meningkatkan partisipasi dan dukungan masyarakat. Upaya ini tidak hanya memperkuat koordinasi internal tetapi juga memperluas penyebaran informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, tujuan dari program Kampung KB dapat tercapai secara optimal, memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

## **Sumber Daya**

Sumber daya dalam program Kampung KB peran berbagai pihak, termasuk Dinas PPKB Kabupaten Ponorogo, PLKB Kecamatan Kauman dan PLKB Kecamatan Jambon, dan Pokja Kampung KB Desa Nongkodono dan Pokja Kampung KB Desa Karanglo Kidul, sangat penting untuk mewujudkan kampung yang berkualitas. Dinas PPKB bertanggung jawab atas komunikasi, advokasi, dan koordinasi lintas sektor untuk memastikan keberhasilan program Kampung KB. Penyuluh memiliki tugas yang mencakup penyuluhan mengenai usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Selain itu, mereka juga membina kelompok-kelompok di Kampung KB seperti Tribina, BKL, BKR, dan BKB. Dalam struktur organisasi, penyuluh berperan sebagai sekretaris Pokja Kampung KB, dengan kepala desa sebagai ketua, memastikan pelaksanaan program sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Pokja Kampung KB di tingkat desa memiliki peran penting dalam pelaksanaan program dengan melakukan koordinasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan berbagai sektor terkait. Mengadakan pertemuan untuk memantau kemajuan, mengatasi masalah, dan memberikan edukasi tentang perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi. Pokja juga mengatur kegiatan yang mendukung kesejahteraan keluarga, seperti penyuluhan tentang keluarga berencana, serta pengelolaan posyandu dan BKL. Mereka berfungsi sebagai penghubung, memastikan informasi tersebar dengan baik dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Pelaksana Pokja Kampung KB di Desa Nongkodono dan Desa Karanglo Kidul menunjukkan keterampilan tinggi dalam mengelola program BKL dan BKB. Mereka efektif dalam menyelenggarakan program-program tersebut secara satu bulan sekali, memenuhi kebutuhan lansia dan balita, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Keterampilan koordinasi dan pelaksanaan yang baik, bersama dengan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, merupakan faktor penting dalam keberhasilan program Kampung KB. Sinergi dan kerjasama yang solid antara berbagai pihak terkait mendukung pencapaian tujuan program dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

## **Disposisi**

Disposisi program Kampung KB mengikuti hierarki yang terstruktur mulai dari tingkat nasional hingga tingkat desa untuk memastikan implementasi yang efektif. Dimulai dari Instruksi Presiden, yang menetapkan kebijakan nasional, program

Kampung KB kemudian mendapatkan arahan dan pengawasan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di tingkat nasional. BKKBN berfungsi sebagai lembaga yang mengarahkan dan memantau pelaksanaan program secara keseluruhan. Di tingkat kabupaten, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) bertanggung jawab atas koordinasi dan supervisi. DPPKB memastikan bahwa program dilaksanakan dengan baik di wilayah kabupaten dengan memberikan bimbingan dan dukungan kepada kecamatan-kecamatan. Selanjutnya, di tingkat kecamatan, Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) memainkan peran penting dalam melaksanakan kegiatan teknis dan mendukung implementasi program di lapangan.

Di tingkat desa atau kelurahan, kelompok kerja (Pokja) Kampung KB memiliki peran kunci dalam mengelola dan menjalankan program secara langsung. Pokja bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan dan program dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, serta melakukan koordinasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan sektor terkait lainnya. Melalui struktur disposisi ini, setiap tingkat memiliki tanggung jawab yang jelas untuk mendukung dan memastikan keberhasilan program Kampung KB, dari perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan.

### **Struktur Birokrasi**

Struktur Birokrasi Pokja Kampung KB dirancang dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program. Camat berperan sebagai pembina utama, memberikan arahan dan supervisi secara umum. Ketua Pokja dipegang oleh Kepala Desa, yang memimpin koordinasi dan pelaksanaan program di tingkat desa. Sekretaris dijabat oleh Koordinator PLKB, yang bertanggung jawab untuk administrasi dan dokumentasi. Struktur Pokja juga mencakup berbagai seksi yang memiliki fokus khusus, yaitu seksi agama, seksi kasih sayang, seksi perlindungan, seksi sosial budaya, seksi reproduksi, seksi sosial dan pendidikan, seksi ekonomi, dan seksi pembinaan lingkungan. Pembagian ini bertujuan untuk mengatasi berbagai aspek dari program Kampung KB secara menyeluruh, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara efektif.

Dalam pelaksanaan program Kampung KB, terdapat konsistensi dalam keterlibatan aktor di tingkat desa, baik di Desa Nongkodono maupun Desa Karanglo Kidul. Dinas PPKB Kabupaten Ponorogo memegang peran sebagai pihak utama yang memberikan arahan strategis dan dukungan umum. PLKB di tingkat kecamatan memberikan dukungan teknis dan bantuan dalam pelaksanaan

program di lapangan. Pemerintah desa, melalui Pokja Kampung KB, berfungsi sebagai pengelola program di tingkat lokal, mengkoordinasikan berbagai kegiatan dan memastikan implementasi program berjalan sesuai rencana. Masyarakat berperan sebagai penerima manfaat dan peserta aktif dalam kegiatan kampung KB. Kolaborasi antara Dinas PPKB, PLKB, pemerintah desa, dan masyarakat ini memastikan bahwa program Kampung KB dapat dilaksanakan dengan baik, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan memberikan manfaat yang maksimal. Sinergi antara semua pihak tersebut merupakan kunci keberhasilan program Kampung KB dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat desa. Dengan sistem yang terstruktur ini, program Kampung KB dapat dilaksanakan secara efektif, dengan penyesuaian yang diperlukan di setiap tingkat untuk memenuhi kebutuhan lokal dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## **SIMPULAN**

Komunikasi dan koordinasi antar berbagai pihak menjadi kunci utama dalam pelaksanaan program ini. Disposisi program Kampung KB dimulai dari Instruksi Presiden yang menetapkan kebijakan nasional. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) kemudian bertugas untuk mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan program di tingkat nasional. Di tingkat kabupaten, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) memainkan peran penting dalam koordinasi dan supervisi, memastikan bahwa program diterapkan dengan baik di seluruh wilayah kabupaten. Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di tingkat kecamatan memberikan dukungan teknis dan membantu implementasi program secara langsung di lapangan. Di tingkat desa, kelompok kerja (Pokja) Kampung KB bertanggung jawab untuk mengelola dan menjalankan program secara lokal, melakukan koordinasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan sektor terkait, serta memastikan bahwa program dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Struktur organisasi Pokja Kampung KB dirancang dengan pembagian tugas yang jelas. Camat bertindak sebagai pembina utama, Kepala Desa sebagai ketua, dan Koordinator PLKB sebagai sekretaris. Pokja terdiri dari berbagai seksi dengan fokus khusus, seperti seksi agama, seksi kasih sayang, seksi perlindungan, seksi sosial budaya, seksi reproduksi, seksi sosial dan pendidikan, seksi ekonomi, dan seksi pembinaan lingkungan. Pembagian ini memastikan bahwa semua aspek dari program Kampung KB dapat ditangani secara menyeluruh dan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Angisna, T. (2018). Evaluasi Efektivitas Pelatihan Kampung Kb Di Perwakilan Bkkbn Provinsi Jawa Timur. *Jurnal PROMKES*, 6(1), 93. <https://doi.org/10.20473/jpk.v6.i1.2018.93-104>
- Apriliansi, I. M., Purba, N. P., Dewanti, L. P., Herawati, H., & Faizal, I. (2021). Open access Open access. *Citizen-Based Marine Debris Collection Training: Study Case in Pangandaran*, 2(1), 56–61.
- Arischa. (2020). *Analisis Kerja Bidang Pengelolaan Kampung KB Kabupaten Magetan*.
- Azhari, H. P. (2019). *Strategi Komunikasi Bkkbn Provinsi Sumatera Utara Dalam Mensosialisasikan Program Pembentukan Kampung Kb*.
- Febrian. (2022). Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (Kb) Dalam Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk Di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur. *Eprints.Ipdn.Ac.Id*.
- Maemanah. (2017). *Jenis Penelitian Kualitatif*. *Journal Penelitian IAIN Raden Intan Lampung*.
- Maleke, T. S., Pangkey, M., & Tampongangoy, D. (2022). Efektivitas Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Desa Tamboan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik JAP No, VIII(119)*, 27–36.
- Miles, Huberman, A., & Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis*.
- Nanggung, D., Anak, R. P., & Pemanfaatan, S. (2023). *Dharma Wiyata : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Dharma Wiyata : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 1(35), 35–40.
- Rohayati, S., Agustino, L., Yulianti, R., & Tirtayasa, A. (2021). Pelaksanaan program kampung keluarga berencana di kelurahan nyapah kecamatan walantaka kota serang the implementation of the family planning village program in the village of nyapah, at walantaka district of serang city. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 5(2), 129–130.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2022). Inilah Inpres 3/2022 Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas. *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*. <https://setkab.go.id/inilah-inpres-3-2022-tentang-optimalisasi-penyelenggaraan-kampung-keluarga-berkualitas/>

Soripada, R. A. (2021). *Analisis Konsep Boundaryless Organization Sebagai Strategi Perusahaan Di Era Globalisasi Studi Kasus : PT . TOTAL E & P INDONESIA*. 2(2), 124–132.

Syahril. (2016). *Metodologi Penelitian*.

Widya Saputra, Y., Susmei Rindantya Prodi Pendidikan Geografi Universitas Mulawarman, R., & Timur, K. (2019). Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kota Samarinda. *Jurnal Georafflesia Artikel Ilmiah Pendidikan Geografi*, 4, 186–200.  
<https://journals.unihaz.ac.id/index.php/georafflesia>